

KEBIJAKAN LITERASI INFORMASI DAN LITERASI DIGITAL DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Anjas Alifah Bakry dan Nanik Arkiyah

Universitas Ahmad Dahlan

Emai: anjasbakry@gmail.com, nanik.arkiyah@staff.uad.ac.id

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan literasi informasi dan literasi digital yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Teori yang digunakan dalam makalah ini yaitu teori kebijakan publik, implementasi kebijakan dan indikator dari implementasi kebijakan. Indikator digunakan pada makalah ini untuk dapat melihat bagaimana kebijakan itu dijalankan, bagaimana hasil dan kendala apa saja dalam proses implementasi kebijakan juga terdapat didalamnya. Hasil dari penelitian menunjukkan, kebijakan terkait kegiatan dan pelatihan literasi informasi di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan melalui instruksi kerja no: IK-UAD-PERP-21, memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi universitas dalam memudahkan sasaran yang utamanya yaitu; mahasiswa dan dosen untuk mencari sumber reference yang relevan, memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Kendala yang dijumpai hanya kurangnya ruang khusus untuk kegiatan literasi di setiap kampus yang ada di universitas. Dukungan dari universitas diperlukan untuk kebijakan ini dapat berjalan, dan dapat memberikan solusi dari kendala yang ada.

Kata Kunci: Kebijakan, Literasi Informasi, Literasi Digital

Pendahuluan

Literasi secara umum mempunyai makna sebagai kemampuan untuk menulis dan membaca, namun pada perkembangannya kata literasi mempunyai makna luas, jika disandingkan dengan perkembangan pendidikan, teknologi, sosial dan komunikasi. Konsep-konsep seperti literasi media, literasi digital dan literasi informasi frekuensi penggunaannya lebih besar di bidang pendidikan dan komunikasi. (Fantin, 2010). Literasi informasi dan literasi digital sering digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya perpustakaan, dalam kajian ini yaitu perpustakaan universitas. Pada lingkup perpustakaan universitas, makna dari literasi informasi dan literasi digital menjadi berkembang sebagai kegiatan untuk membantu pemustaka dalam menemukan sumber informasi secara efektif dan efisien. Literasi Informasi membutuhkan literasi digital untuk mengakses penelitian online yang sesuai sumber, dan Literasi Informasi memberi konteks lebih lanjut ke keterampilan evaluasi dikembangkan oleh literasi digital (ALA,2000).

Sebagai pusat sumber informasi ilmiah di universitas, perpustakaan tidak hanya mengelola bahan pustaka saja, namun juga perlu adanya kegiatan literasi informasi dan literasi digital untuk memperkenalkan kepada pemustaka tentang fungsi lain dari perpustakaan. Kendala yang sering ditemui oleh pustakawan di universitas yaitu tentang kegiatan apa yang harus dilakukan untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Pemustaka tidak hanya membutuhkan layanan konvensional seperti sumber-sumber informasi dalam bentuk tekstual, namun mereka juga membutuhkan sumber informasi digital yang lebih *up to date* melalui internet.

Kegiatan literasi informasi di perpustakaan dapat diterapkan oleh pustakawan, karena mempunyai manfaat yaitu; dapat membantu pemustaka dalam pencarian artikel database, memberikan informasi tentang istilah dari klasifikasi bahan pustaka, evaluasi hasil artikel yang telah ditemukan menjadi lebih mudah. Sedangkan manfaat adanya kegiatan literasi digital di perpustakaan yaitu; mempraktikkan kepada pemustaka untuk dapat menavigasi dan memanfaatkan situs web

perpustakaan, menemukan jurnal yang relevan dan sesuai keilmuan, dapat menemukan file bantuan dengan mudah, dan lain-lain.

Kegiatan literasi informasi dan literasi digital di perpustakaan universitas dapat terlaksana, jika pustakawan mempunyai komitmen untuk perkembangan perpustakaan menjadi lebih baik lagi. Komitmen dan dukungan dari pimpinan universitas menjadi penting agar prosedur dan sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Komitmen melalui Kebijakan terkait literasi informasi dan literasi digital di perpustakaan universitas menjadi penting, karena pada dasarnya kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah supaya dalam kegiatan perpustakaan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna lebih mudah di realisasikan. Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi sumber informasi untuk pembelajaran, pendidikan dan penelitian, mempunyai kebijakan terkait kegiatan literasi informasi dan literasi digital untuk memudahkan mahasiswa, dosen dalam memenuhi kebutuhan informasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan data yang telah ada dan menganalisa untuk mendapatkan gambaran secara umum. indikator implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis tentang pentingnya kebijakan terkait layanan literasi informasi di perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.

Pembahasan

Pembahasan yang akan diuraikan pada makalah ini yaitu tentang literasi informasi dan literasi digital, kebijakan yang terkait literasi informasi di Universitas Ahmad Dahlan, serta bagaimana implementasinya juga dibahas pada bagian selanjutnya.

Literasi Informasi dan Literasi Digital

Literasi informasi dan literasi digital menjadi saling terhubung ketika disandingkan dengan layanan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi terkait pendidikan dan penelitian di universitas. Literasi informasi sebagai keterampilan masyarakat dalam mengindikasikan kemungkinan untuk orang mencari, memilih dan memvalidasi informasi yang ditemukan di internet. Sebagai bagian dari pengalaman lapangan tentang media literasi, terutama kemampuan orang untuk mengevaluasi secara kritis sumber informasi (Rivoltella, 2010). Keterampilan ini semakin diperlukan dalam masyarakat di mana informasi semakin berlimpah dan pengetahuan menjadi semakin tidak terkendali.

Digitalisasi melibatkan potensi untuk konvergensi komunikasi yang berbeda dan menyiarkan media, menghasilkan media hibrida, sementara komunikasi konvensional menjadi berkurang (Pérez-Tornero, 2004). Singkatnya, kemampuan dalam literasi digital sangat tergantung pada pengalaman akademik seseorang daripada pengalaman teknis, dan bagaimana seseorang mengatur dan mengintegrasikan informasi yang mereka temukan bukan pada seberapa banyak informasi yang mereka teliti. Fenomena ini membutuhkan keterampilan baru, keahlian baru, cara-cara pemikiran baru dan tindakan, dan bentuk-bentuk hubungan sosial baru. Singkatnya, ini menuntut kultur digital dan literasi yang baru (Perez-Tornero, 2001). Inilah sebabnya mengapa kita perlu memahami literasi digital dan bagaimana ini terhubung dengan proses pendidikan dan penelitian di universitas. Teknologi digital yang terkait dengan literasi digital termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh siswa untuk pendidikan, sosial dan / atau tujuan hiburan di sekolah dan di rumah. Teknologi ini termasuk desktop, perangkat seluler (laptop, tablet, ponsel, ponsel pintar, PDA, konsol game), sumber daya di Internet (informasi, multimedia dan komunikasi sumber daya, teknologi Web 2.0), perangkat rekaman digital (peralatan pencatatan data, mikroskop digital, flipcams, smartpens, kamera, suara, dan video perekam), papan putih interaktif dan kisaran perangkat lunak yang memupuk pembelajaran dan rekreasi (Wan, 2011).

Melalui penggunaan teknologi digital untuk membantu kegiatan terkait literasi digital yang didalamnya termasuk juga kegiatan literasi informasi akan menimbulkan kesadaran, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan digital secara tepat alat dan fasilitas untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisa dan mensintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, membuat media ekspresi, dan berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks situasi kehidupan tertentu, dalam rangka aktifkan aksi sosial yang konstruktif; dan untuk mencerminkan pada proses ini (Martin, 2005, hal. 135 dalam Wang, 2011). Literasi informasi dan literasi digital mempunyai manfaat begitu besar bagi perkembangan pembelajaran dan penelitian di Universitas Ahmad Dahlan, sehingga perpustakaan sebagai unit pelayanan teknis universitas, merasa penting adanya kebijakan terkait layanan literasi. Kebijakan diperlukan agar seluruh unit perpustakaan yang terdapat di setiap kampus di Universitas Ahmad Dahlan dapat melaksanakan kegiatan layanan literasi dengan terkontrol dan melalui prosedur yang jelas, sehingga tujuan bersama dalam meningkatkan layanan perpustakaan melalui layanan literasi juga dapat terealisasi. Adanya kebijakan juga dapat membantu perpustakaan dalam berkoordinasi dengan unit lain yang dibutuhkan seperti; fakultas, biro sistem informasi dan komunikasi, dan biro kemahasiswaan dan alumni.

Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan atau telah dilakukan oleh aktor kebijakan. Melalui proses kebijakan yang telah dibuat, selalu mempunyai tujuan untuk memudahkan jalannya kegiatan. Kebijakan sebagai pijakan utama dengan tujuan memecahkan masalah yang dihadapi sebuah institusi, mempunyai makna yang luas dan multi interpretasi. Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Parsons, 2005: 15) “Sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern: sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai *output*, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses”. Sedangkan Menurut James E. Anderson (dalam Suwitri, 2014: 6) “kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Kebijakan terkait literasi informasi dan literasi digital di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan tertuang melalui Instruksi Kerja nomor: IK-UAD-PERP-21. Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut yaitu memastikan proses kegiatan literasi di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi setiap unit di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan akan menjadi lebih jelas dan mudah dengan adanya standar prosedur terkait kegiatan literasi melalui kebijakan tersebut. Tidak mudah untuk dapat melaksanakan kegiatan literasi dilihat dari 43 jurusan atau program studi yang ada, dikarenakan kurangnya ruang khusus untuk kegiatan literasi di 6 kampus Universitas Ahmad Dahlan yang tersebar di kota Yogyakarta. Ruang khusus untuk kegiatan literasi hanya ada di kampus 3, dan baru tahap pembangunan ruang Literasi di kampus 4. Sehingga dengan adanya kebijakan tentang literasi ini memudahkan pustakawan dalam mengadakan kegiatan pelatihan literasi.

Implementasi

Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan dibuat. Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Menurut Subarsono (2009: 87) ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Mempelajari tentang implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi bila suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Menurut Wahab (1990:123) implementasi kebijakan merupakan peristiwa atau kegiatan

yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkur usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Proses dalam implementasi kebijakan Menurut Parsons (2005: 465) mempunyai dua model pendekatan untuk bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dipraktikkan, yaitu model pendekatan rasional *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan rasional *top-down* ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem; dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesis kebijakan. Sedangkan pada model *bottom-up* menekankan pada fakta bahwa implementasi “dilapangan” memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan, sehingga para profesional mempunyai peran penting dalam menjamin pelaksanaan sebuah kebijakan sehingga semuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol dan memberikan pelayanan.

Kebijakan literasi di Universitas Ahmad Dahlan dalam praktiknya menggunakan pendekatan rasional *bottom-up*, dalam perjalanannya kebijakan literasi telah dilaksanakan mulai bulan April tahun 2016 hingga sekarang. Namun pada awal kegiatan literasi, belum ada kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh perpustakaan. Perpustakaan menjalankan kegiatan literasi atas dasar kebutuhan sivitas akademik yang merasa kesulitan dalam mencari sumber informasi yang relevan, bagaimana cara mengelola sumber informasi dan lain-lain terkait bagaimana memanfaatkan digilib dan e-prints dari Universitas Ahmad Dahlan. Berawal dari permasalahan itu perpustakaan membentuk tim penanggung jawab disetiap kampus yang ada di UAD untuk dapat mengadakan pelatihan literasi. Tim penanggung jawab inilah yang merumuskan materi apa saja yang akan diajarkan pada proses kegiatan literasi. Pembuatan kebijakan literasi baru pada tahun 2018, karena perpustakaan merasa pentingnya kebijakan ini dibuat, yaitu untuk mengontrol dan menjamin dalam pelaksanaan kegiatan untuk semua kampus di Universitas Ahmad Dahlan menjadi seragam.

Implementasi kebijakan juga sangat terkait dengan sumber daya dan penyusunan organisasi diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Subarsono (2009:12): pada proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik”. Kebijakan melalui instruksi kerja pelatihan literasi informasi no: IK-UAD-PERP-24, menjelaskan secara detail tentang ruang lingkup yang harus dilakukan karyawan perpustakaan dalam proses kegiatan pelatihan literasi. Materi yang akan diajarkan, standar jumlah peserta disetiap kelasnya, membuat jadwal dan tempat untuk pemateri menjadi perhatian yang telah diuraikan dalam instruksi kerja, hingga pada proses honorarium.

Setelah tahap implementasi ini akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Pada proses implementasi kebijakan literasi di Universitas Ahmad Dahlan yang sudah dijalankan, kita dapat menilai kinerja implementasi kebijakannya, yaitu melalui indikator kinerja implementasi kebijakan. Purwanto, (2012:102) mengungkapkan jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka penulis dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek yang telah dijalankan. Sebagai sebuah alat ukur menurut purwanto, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka-angka). Angka-angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang akan dibahas selanjutnya dalam mengukur kinerja implementasi dibedakan menjadi dua, yaitu indikator *output* dan indikator *outcome*.

Indikator Policy Output

Kerangka pengukuran kinerja implementasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, pada indikator *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan menguraikan indikator *output* yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja implementasi kebijakan terkait literasi di Universitas Ahmad Dahlan.

a. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Tahap implementasi dilapangan tentunya akan ada permasalahan tentang bagaimana sasaran untuk mendapat informasi terkait adanya kegiatan pelatihan literasi informasi. Untuk mengantisipasi jika ada permasalahan terkait materi dari kegiatan literasi informasi dan pendaftaran untuk jadwal lokasi dan waktu pelaksanaan, penanggung jawab khusus untuk menangani terkait kegiatan literasi informasi perpustakaan dibuat pada setiap unitnya perpustakaan yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. kemudahan segala informasi terkait kegiatan literasi informasi bisa didapatkan melalui datang langsung ke perpustakaan.

b. Cakupan (*coverage*)

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau dalam mendapatkan layanan. Pada kebijakan literasi informasi di Perpustakaan Ahmad Dahlan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk seluruh sivitas akademik universitas, namun ada perhatian khusus untuk mahasiswa semester awal, mahasiswa semester enam untuk persiapan penelitian tugas akhir, mahasiswa pascasarjana, dan dosen. Hasil dari implementasi kebijakan literasi informasi yang telah dijalankan, dari tahun 2016 hingga awal 2018 dapat diketahui sebagai berikut:

- Mahasiswa baru dengan rata-rata 5000 mahasiswa sebagai sasaran 50 % telah mendapatkan *user education* terkait bagaimana menggunakan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi.
- Mahasiswa semester enam yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian 50 % dari total mahasiswa telah mengikuti materi terkait tentang pencarian informasi online dan reference manager. Pada materi inilah literasi digital dibutuhkan untuk mendukung kegiatan literasi informasi di Universitas Ahmad Dahlan.
- Mahasiswa pascasarjana jumlah sasaran yang telah mengikuti kegiatan pelatihan mencapai 100 % dengan mengadakan kuliah umum.
- Dosen sebagai salah satu sasaran dari kebijakan ini dalam implementasinya baru mencapai 20 % dari total dosen yang ada di Universitas Ahmad Dahlan.

c. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan. Tahapan terkait indikator frekuensi pada kebijakan literasi informasi perpustakaan sebagai eksekutor dari kebijakan menawarkan materi literasi pilihan. Materi yang di tawarkan merupakan pilihan dari kelompok sasaran, dengan rata-rata kelompok sasaran mengakses 3 dari 4 materi yaitu literasi dasar, pemaksimalan word, dan *e-prints*. Kelompok sasaran untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana tentunya prioritas materinya akan berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan khusus mahasiswa pascasarjana akan mengambil semua materi literasi informasi yang telah disediakan, karena sangat mendukung terkait pembelajaran dan penelitian mereka.

Perpustakaan sebagai eksekutor terkait kebijakan literasi informasi tentunya akan memudahkan sasaran dalam mengikuti kegiatannya. Ada kesepakatan antara kelompok sasaran dan pihak perpustakaan untuk menentukan dalam mengikuti pelatihan di tiap materi. Karena tiap satu materi membutuhkan satu sesi waktu, sehingga untuk materi selanjutnya membutuhkan kesepakatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- Tentor
- Lab komputer (selain di Ruang Literasi)
- Jadwal dari mahasiswa.

d. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer (pustakawan) menyimpang dari kelompok sasaran. Kebijakan yang telah dibuat terkait literasi informasi dalam implementasinya sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan di awal kebijakan dibuat.

e. Service Delivery (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Permintaan terkait kegiatan pelatihan literasi informasi dalam implementasinya selalu langsung diproses, namun masih ada beberapa kendala dalam ketepatan layanannya, seperti: melihat jadwal kalau ada waktu yang kosong di Ruang literasi Kampus 3, mencari lab komputer yang kosong di Kampus 1,2,dan 5, dan tentunya menyesuaikan antara jadwal mahasiswa dan jadwal lab komputer yang kosong.

f. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan literasi informasi pada implementasinya, terkait waktu yang digunakan sudah sesuai dan memadai untuk yang literasi dasar, eprints dan pemanfaatan word tetapi untuk reference manager waktu yang diperuntukkan 2 jam masih kurang. Salah satu isi dalam kebijakannya, pemateri untuk pelatihan literasi informasi dijelaskan bahwa kebutuhan sasaran dengan minimal 15 orang untuk setiap 1 tentor, dan dalam implementasinya tentunya telah mengikuti prosedur yang ada, untuk mengurangi kendala dan permasalahan yang timbul ketika pelatihan itu berlangsung. Pelatihan yang telah dilakukan tentunya perlu di review ulang, untuk mengingatkan kembali apa saja yang telah diajarkan oleh sasaran, untuk itu perpustakaan memberikan penyegaran melalui game review sebagai evaluasi menggunakan “game kahoot”.

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Hasil dari implementasi kebijakan literasi informasi yang dibuat, sesuai dengan kebutuhan dari sasaran. Karena manfaat yang didapatkan setelah adanya kegiatan literasi informasi, sasaran menjadi lebih mudah dalam mencari referensi online, dan tentunya membantu dalam pembelajaran dan penelitian yang akan dilakukan.

Indikator *Policy Outcome*

Indikator kedua adalah *policy outcome*, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur indikator *outcome* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Dampak kebijakan bagi sasaran dan institusi dengan adanya kebijakan literasi, yaitu: Mahasiswa termotifasi untuk mengikuti kegiatan literasi informasi, dalam beberapa kelas menggunakan jam mata kuliah dosen yang mewajibkan mahasiswa mengikuti literasi informasi. Kendala yang paling besar terkait kebijakan literasi informasi di Universitas Ahmad Dahlan, yaitu: belum ditetapkan sebagai kegiatan wajib untuk literasi informasi, sehingga sasaran belum maksimal. Diperlukan suatu kebijakan dari pimpinan universitas, agar unit terkait seperti fakultas, biro sistem informasi dan komunikasi, dan biro kemahasiswaan dan alumni dapat membantu kebijakan perpustakaan dalam kegiatan literasi informasi berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Literasi informasi dan literasi digital pada kenyataannya tidak bersaing konsep, namun saling terhubung. Institusi pendidikanlah yang dapat merasakan dampak adanya literasi informasi dan literasi digital, karena dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan akses informasi yang relevan dengan kebutuhan. Seperti dalam penelitian ini konsep literasi digital dan keterampilan dapat memberikan dasar-dasar mengelola lingkungan digital yang sivitas akademik perlu untuk berhasil dalam literasi Informasi dan literasi digital pada bidang studi mereka.

Kebijakan terkait kegiatan dan pelatihan literasi informasi di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan melalui instruksi kerja no: IK-UAD-PERP-21, memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi universitas dalam memudahkan sasaran yang utamanya yaitu; mahasiswa dan dosen untuk mencari sumber referensi yang relevan, memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Kendala dalam tiap implementasi kebijakan tentu pasti ada, dengan adanya indikator implementasi kebijakan, dapat terlihat kendalanya yaitu; ruang khusus literasi belum tersedia semua, hanya ada di kampus 3, sedangkan untuk kampus lainnya mengandalkan waktu yang kosong di ruang laboratorium komputer, kesepakatan antara sasaran dengan perpustakaan juga menjadi kendala dalam penentuan waktu yang tepat dalam pelaksanaan. Adanya kendala yang ada, dapat menjadi perbaikan bagi perpustakaan untuk menjadikan kebijakan literasi informasi dapat berjalan lebih baik lagi. Dukungan universitas menjadi sangat penting dalam merealisasikan kebijakan, dan meningkatkan hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Adanya kegiatan pelatihan literasi informasi dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh sivitas sehingga perpustakaan sebagai pusat sumber informasi yang mendukung pembelajaran dan pendidikan di lingkungan kampus menjadi lebih baik lagi. Literasi informasi dan literasi digital melalui konseptualnya, dapat di implementasikan oleh Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan melalui kebijakannya yang direalisasikan melalui kegiatan dan materi yang ada, sehingga memberikan pendidikan yang kaya pengalaman untuk mahasiswa dan dosen di Universitas Ahmad Dahlan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Library Association. Office for Information Technology Policy. Digital Literacy Task Force. (2013). Digital literacy, libraries, and public policy: Report of the Office for Information Technology Policy's Digital Literacy Task Force. Retrieved from http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/01/2012_OITP_digitalLiteracyreport_1_22_13.pdf.
- Fantin, M. (2010). Perspectives on Media Literacy, Digital Literacy and Information Literacy. *International Journal of Digital Literacy and Digital Competence*, 1(4), 10–15. <https://doi.org/10.4018/jdlldc.2010100102>.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suwitri, Sri, dkk. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wan, N. (2011). Why digital literacy is important for science teaching and learning. *Teaching Science: The Journal of the Australian Science Teachers Association*, 57(4), 26–32. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=71529960&site=ehost-live>